

Analisis Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah



Maria V. Watuseke¹, Jenny Morasa², Christian Datu³
*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Sam Ratulangi,
Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kode Pos 95115, Indonesia*

Correspondence: mariawatuseke064@student,unsrat.ac.id

Jurnal Riset Akuntansi :
SOLVENCY
Vol. 1 No. 3, 2026
pp.55-59

Abstract

Keywords

This study aims to analyze the financial performance of the Department of Tourism and Culture of Manado City through the Budget Realization Report (LRA) for the 2021–2024 period. This study utilizes a descriptive quantitative research design. Financial performance was evaluated using public sector ratio analysis, specifically variance analysis and efficiency ratios. The results reveal that on the revenue side, the agency does not record independent revenue due to its function as a cost center, with all tourism receipts managed centrally by KP2T under the one-stop service policy. On the expenditure side, budget absorption remained high, averaging above 92%, reflecting excellent program execution. However, based on efficiency ratios, total expenditure falls into the "Less Efficient" category as realization closely approached the budget ceiling. The study is limited to the LRA data of a single local government unit (Department of Tourism and Culture of Manado City) covering the 2021–2024 period. This study provides empirical evidence on how public sector financial ratio analysis, particularly variance and efficiency ratios, is applied to evaluate budget realization in a regional tourism department.

**Financial Performance;
Budget Realization Report;
Public Sector Accounting;
Expenditure Efficiency;
Budget Ceiling.**

1. Pendahuluan

Pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada perencanaan serta pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang terarah. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah mendanai kewajiban operasional, penyediaan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Pengelolaan APBD wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tepat sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tuntutan reformasi manajemen keuangan publik mengharuskan setiap instansi pemerintah tidak hanya berfokus pada daya serap anggaran semata, melainkan juga harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan setiap rupiah anggaran publik berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Sebagai bagian dari penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010), instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di setiap akhir periode fiskal. LRA berfungsi membandingkan antara target anggaran dan realisasi riil di lapangan guna menilai akuntabilitas serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Melalui LRA, tingkat kedisiplinan anggaran, efisiensi alokasi belanja, serta keberhasilan eksekusi program kerja instansi dapat diukur secara kuantitatif.

Kota Manado merupakan salah satu pusat destinasi wisata unggulan di Indonesia yang membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan pengelolaan anggaran yang optimal. Namun, secara administratif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado tidak mencatatkan realisasi pendapatan mandiri pada LRA milik instansi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan *one-stop service*, di mana retribusi dan pajak sektor pariwisata dikelola secara terpusat melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kondisi ini menempatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado murni sebagai *cost center*, sehingga evaluasi kinerja keuangannya berfokus penuh pada efektivitas penyerapan serta efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado periode 2021–2024, khususnya dalam mengukur efektivitas penyerapan anggaran belanja serta tingkat efisiensi alokasi dana operasional dan modal dalam posisinya sebagai *cost center*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi manajemen instansi dalam mengoptimalkan perencanaan anggaran dan efisiensi pengeluaran di masa mendatang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntansi

Akuntansi mengklasifikasikan, meringkas, mengatur, dan mengkomunikasikan transaksi, peristiwa, dan data keuangan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi adalah bidang artistik yang mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan, menurut Thomas Sumarsan (2020). Laporan keuangan dari siklus ini membantu para pemangku kepentingan untuk merencanakan secara strategis.

2.2. Akuntansi Pemerintahan dan APBD

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan transaksi keuangan di instansi publik. APBD bertindak sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang mencakup tiga pilar akuntansi utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (Mardiasmo, 2020). Sebagai pedoman operasional harian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat otorisasi dan perencanaan anggaran, melainkan juga bertindak sebagai standar penilaian kinerja manajemen keuangan daerah untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya finansial telah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta regulasi yang berlaku.

2.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merujuk pada PSAP No. 01 dan 02 (PP No. 71 Tahun 2010), LRA menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Komponen LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan yang membandingkan antara target anggaran dengan realisasi riilnya. LRA berguna untuk mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya finansial serta mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Melalui penyajian LRA, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menilai tingkat disiplin anggaran instansi, mengidentifikasi adanya varians atau selisih belanja, serta mengukur tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam merealisasikan program kerja yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kuantitatif menafsirkan kejadian menggunakan statistik untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang situasi tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado menjadi objek dalam penelitian ini, dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2021-2024.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara, yaitu Metode pengumpulan data mendalam melalui sesi tanya jawab langsung antara peneliti dan informan.
2. Observasi, yaitu mengembangkan kerangka konseptual untuk masalah judul studi penulis dan secara langsung melihat objek penelitian.
3. Dokumentasi, Mengumpulkan LRA resmi periode 2021–2024

3.3 Data Analisis

Analisi data mencakup:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk menilai kinerja keuangan dengan membandingkan anggaran dengan hasil. Berikut rumus selisih pengeluaran :

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini digunakan untuk menilai pengurangan anggaran pemerintah. Rasio Efisiensi Pengeluaran Regional yang lebih kecil menunjukkan keuangan pemerintah yang lebih sehat.

Rumus untuk mengukur Rasio Efisiensi Pengeluaran:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

4.1.1 Realisasi Anggaran Belanja (2021–2024)

Tabel 4.1. Realisasi Anggaran Belanja Kota Manado

Tahun	Anggaran belanja	Realisasi	Hasil
2021	12.613.462.372,00	11.649.276.529,00	964.185.843,00
2022	11.952.311.160,00	11.559.469.479,00	392.841.681,00
2023	12.293.039.122,00	12.019.063.703,00	273.975.419,00
2024	8.609.052.669,00	8.228.038.334,00	381.014.335,00

Sumber : LRA Dinas Pariwisata Kota Manado

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat adanya penurunan signifikan pada pagu anggaran di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu, turun menjadi Rp. 8.609.052.669,00. Selisih paling terbesar terjadi pada tahun 2021 dengan nilai penghematan mencapai Rp. 964.185.843,00. Perhitungan analisis Varians Belanja Dinas Pariwisata Kota Manado menunjukkan bahwa varians belanja pada tahun 2021-2024 memiliki kinerja yang baik.

4.1.2 Analisis Rasio Efisiensi Belanja

1. Efisiensi Belanja Tahun 2021

Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 2021

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Belanja	12.613.462.372,00	11.649.276.529,00
Belanja Operasi	9.266.658.197,00	8.513.949.529,00
Belanja Modal	3.346.804.175,00	3.135.327.000,00

Sumber : LRA Dinas Pariwisata Kota Manado

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa Pengelolaan belanja dinas pariwisata kota Manado tahun 2021 masih termasuk dalam kategori kurang efisien. Namun hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah baik, tapi penghematan atau efisiensi biayanya masih tergolong rendah.

2. Efisiensi Belanja Tahun 2022

Tabel 4.3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 2022

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Belanja	11.952.311.160,00	11.559.469.479,00
Belanja Operasi	8.422.731.160,00	8.133.897.479,00
Belanja Modal	3.529.580.000,00	3.425.572.000,00

Sumber : LRA Dinas Pariwisata Kota Manado

Berdasarkan tabel 4.3 Pengelolaan belanja dinas pariwisata kota Manado masih termasuk dalam kategori kurang efisien. Namun dari sisi penyerapan anggaran, kinerja ini sangat baik karena hampir seluruh dana yang dianggarkan berhasil digunakan.

3. Efisiensi Belanja Tahun 2023

Tabel 4.4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado Tahun 2023

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Belanja	12.293.039.122,00	12.019.063.703,00
Belanja Operasi	12.042.410.122,00	11.768.697.703,00
Belanja Modal	250.629.000,00	250.366.000,00

Sumber : LRA Dinas Pariwisata Kota Manado

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, tingginya angka rasio ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat optimal. Namun pengelolaan belanja dinas pariwisata kota Manado masih masuk dalam kategori kurang efisien.

4. Efisiensi Belanja Tahun 2024

Tabel 4.5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado 2024

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Belanja	8.609.052.669,00	8.228.038.334,00
Belanja Operasi	8.428.156.669,00	8.068.102.334,00
Belanja Modal	180.896.000,00	159.936.000,00

Sumber : LRA Dinas Pariwisata Kota Manado

4.2. Pembahasan

Kinerja Pendapatan

Secara administratif, LRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado mencatatkan angka nihil pada pos pendapatan. Konfirmasi hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan daerah sektor pariwisata (seperti pajak hotel, restoran, dan perizinan usaha) dibukukan satu pintu melalui KP2T dan Bapenda demi kemudahan administrasi (*one-stop service*). Hal ini sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019, di mana Dinas Pariwisata berkedudukan murni sebagai *Cost Center* yang bertugas mengalokasikan anggaran untuk pembangunan serta promosi destinasi.

Kinerja Belanja dan Efisiensi

1. Penyerapan Anggaran yang Optimal: Secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran tergolong sangat tinggi (berkisar antara 92,35% hingga 97,77%). Hal ini menunjukkan bahwa program-program promosi wisata dan pembangunan sarana publik dapat dieksekusi dengan sangat baik sesuai target kuantitatif.
2. Tingkat Efisiensi Pengeluaran: Ditinjau dari rasio efisiensi belanja sektor publik, pengelolaan anggaran instansi berada dalam kategori Kurang Efisien. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja yang selalu mendekati pagu anggaran, sehingga sisa anggaran (penghematan) relatif minim.
3. Dinamika Belanja Modal: Pada tahun 2023, belanja modal diserap hampir sempurna (99,89%), yang mencerminkan keberhasilan eksekusi infrastruktur fisik tepat waktu. Pada tahun 2024, terjadi penurunan rasio efisiensi belanja modal menjadi 88,41% (Cukup Efisien), menunjukkan adanya penekanan pengeluaran biaya dalam pengadaan aset daerah.

5. Kesimpulan

1. Kinerja Pendapatan : Kinerja pendapatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado secara administratif menunjukkan angka nihil atau tidak ada realisasi. Hal ini bukan menunjukkan kegagalan kinerja, melainkan hasil dari kebijakan *one-stop service* dan posisi instansi sebagai *cost center*. Seluruh pendapatan (seperti pajak hotel/restoran) langsung dikelola oleh KP2T. Dinas pariwisata berfokus sebagai unit yang menggunakan anggaran untuk pembangunan dan promosi.
2. Penyerapan Belanja: Secara keseluruhan, kinerja belanja sangat baik dengan rata-rata penyerapan di atas 90%. Ini artinya hampir seluruh program yang direncanakan (seperti promosi wisata dan Pembangunan fasilitas) berhasil dilaksanakan dengan baik dan anggarannya terserap maksimal.
3. Tingkat Efisiensi: Meskipun tingkat penyerapan anggarannya tinggi, namun dari segi efisiensi kinerja belanja dianggap "Kurang efisien". Hal ini dikarenakan realisasi yang dikeluarkan hampir sama besarnya dengan anggaran yang ada. Namun, tingginya angka belanja modal (99,89% di tahun 2023) menunjukkan bahwa pembangunan fisik dinas pariwisata dilakukan dengan sangat baik.

Daftar Referensi

Astuti, A., Sembiring, L. D., Supitriyani, S., Azwar, K., & Susanti, E. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Laporan_Kuangan/

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12712>
- Dewi, N. P. I. C., Sudiarta, I. K., & Karman, I. W. (2023). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020-2022* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali). <http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/7891>
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, Christina, E., & Paul, H. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Anggaran_Perusahaan/
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat. https://penerbitsalemba.com/v2/penerbitan/detail_buku/01-0428
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. <https://mBridge.stimykpn.ac.id/catalog/detail/1234>
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. <https://andipublisher.com/produk/akuntansi-sektor-publik>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. https://penerbitsalemba.com/v2/penerbitan/detail_buku/01-0215
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5103/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/102712/pp-no-12-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://cvetralalfa.com/produk/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd>
- Sumarsan, T. (2020). *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Edisi 3). Jakarta: Indeks. https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Pengendalian_Manajemen/